



# Penolakan terhadap Hak-Hak Perempuan Harus Dihentikan

*Pernyataan Feminis Kolektif*

Sebuah pola yang sangat mengusarkan mulai timbul dalam perdebatan sengit yang berlangsung di beberapa lembaga multilateral saat ini. Pola ini berakumulasi menjadi serangan sistemik terhadap agensi perempuan. Perempuan sering diposisikan sebagai pengasuh keluarga yang rela berkorban, tenaga kesehatan yang berdedikasi, atau ibu yang memenuhi fungsi reproduksi. Narasi kesehatan tradisional yang usang dan menyesatkan ini semakin mengukuhkan peran mereka sebagai kalangan yang rentan. Namun, kenyataannya berbeda: perempuan justru dibuat menjadi rentan.

Pemangkasan anggaran pemerintah yang seharusnya ditujukan untuk memenuhi fungsi-fungsi esensial dan sosial berbanding terbalik dengan janji-janji manis yang mereka terima. Hal ini semakin memperburuk eksploitasi perempuan dan anak-anak perempuan yang secara masif terus bekerja tanpa bayaran<sup>[1]</sup>. Kesenjangan ini tidak hanya melemahkan kemampuan perempuan untuk menentukan nasibnya dan melumpuhkan partisipasi sosial-politik mereka, tetapi juga mengungkap warisan ketidakadilan struktural yang lebih dalam. Warisan ini menuntut perhatian, analisis, dan desakan dari kita semua.

Setelah pandemi dan tahun-tahun pemulihan konflik global, hak perempuan untuk mengekspresikan agensi politis atas tubuh mereka sendiri kembali berada di bawah serangan brutal dalam berbagai bentuk. Serangan terhadap hak-hak dan kesejahteraan perempuan sedang berlangsung dan berkembang secara global. Di Afghanistan, perempuan tanpa ampun diusir dari ruang publik, sementara di Iran, keberanian perempuan telah memicu penindasan brutal oleh patriarki agama. Sementara itu, di Amerika Serikat, reformasi hukum menghapuskan hak aborsi dan membatasi akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi secara umum<sup>[2]</sup>. Di Eropa, sebuah peraturan yang sedang dibahas berisiko mendekriminalisasi pemerkosaan dan melemahkan Konvensi Istanbul. Di Gaza dan Tepi Barat, di mana aksi lembaga-lembaga PBB dan negara-negara anggotanya masih terhambat konflik, sudah lebih dari 35.000 orang tewas tercatat hingga 12 Mei 2024<sup>[3]</sup>. Perempuan dan anak-anak menjadi korban terbanyak. Kisah yang sama, malapetaka yang sama, seperti pada konflik bersenjata lainnya.

Perang memang merupakan intisari dari sistem patriarki. Agresi membenarkan penindasan, dan kekerasan menjadi alat pilihan untuk "menyelesaikan" konflik<sup>[4]</sup>. Dinamika obsesif ini menjadikan tubuh perempuan sebagai medan pertempuran utama dalam perang struktural.

Para pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan bersalah atas kekerasan seksual yang dilakukan pada perempuan dan anak-anak perempuan di Republik Demokratik Kongo selama Covid-19, bahkan para penyintas masing-masing dikenakan biaya sebesar 250 dolar<sup>[5]</sup>. Namun belakangan ini, seruan-seruan untuk reformasi yang responsif terhadap gender dan melindungi hak-hak perempuan kembali ditentang<sup>[6]</sup>. Meskipun terdapat beberapa instrumen normatif internasional dan mekanisme regional yang mengakui serta menegaskan hak-hak seksual dan reproduksi yang mendasar<sup>[7]</sup>, hak-hak ini terus menghadapi tantangan langsung.

Bagaimana hal ini dibenarkan? Di dalam WHO, beberapa orang berpendapat bahwa hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi adalah isu politis yang harus ditangani oleh pemerintah nasional, karena hal tersebut melampaui mandat "teknis" WHO. Namun, kesehatan pada dasarnya bersifat politis—sebuah kenyataan yang diakui secara eksplisit dalam konstitusi WHO, yang menegaskan bahwa faktor politik struktural, seperti pembangunan yang tidak merata dan diskriminasi, merupakan penghalang untuk mencapai hak atas kesehatan. Konstitusi WHO juga mengakui bahwa perdamaian, kerja sama internasional, dan tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya adalah hal yang esensial bagi kesehatan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa relevansi politik WHO menimbulkan ketidaknyamanan ketika dihadapkan dengan pembahasan promosi dan perlindungan hak-hak perempuan, sementara ketidaknyamanan yang sama tidak muncul dalam isu-isu politik sensitif lainnya? Misalnya mendorong negara-negara untuk mempertahankan pengeluaran kesehatan dalam "amplop fiskal" mereka atau bersikeras atas keutamaan hak kekayaan intelektual. Meskipun kebijakan-kebijakan ini menghalangi akses terhadap obat-obatan yang esensial, namun tidak menimbulkan reaksi keprihatinan yang sama.

Mengucilkan dan menundukkan suatu kelompok sosial secara sistematis adalah tanda kekuasaan yang tidak dapat diterima dan terus dipaksakan. Bagi perempuan dan komunitas terkucil lainnya yang menghadapi berbagai ketidakadilan, kekuasaan yang diakui secara luas dan mengakar hingga tertanam kuat ini sering disebut sebagai patriarki. Model patriarki, yang tertanam dalam agama dan warisan struktur kelembagaan, mudah digunakan dan dimanfaatkan secara luas, sehingga diterima dan diinternalisasi melalui sejarah dan bukti-bukti kolonialisme, imperialisme, dan populisme. Inti dari semua ini adalah penindasan terhadap suara, agensi, dan otonomi tubuh.

Bagaimana perempuan dan kaum minoritas lainnya diperlakukan dalam sistem multilateral saat ini mencerminkan logika patriarki yang tak berujung. Hal ini disamarkan melalui retorika yang tidak meyakinkan dan intervensi minimalis demi mengangkat garis bawah. Namun seringkali inisiatif semacam itu berakhir dengan penegasan kembali status quo masyarakat yang stereotip. Hal-hal semacam itu tidak menangani akar kekerasan secara langsung yang sudah melekat dalam sistem. Negara-negara anggota PBB seharusnya berbicara untuk kaum perempuan mereka. Karena seolah-olah perempuan adalah barang!

Di dunia, perempuan adalah kaum mayoritas. Lembaga-lembaga politik di setiap tingkat memiliki kewajiban hukum untuk mengakui dan menghormati, bukannya merongrong kenyataan ini. Sangat penting bagi semua perempuan untuk bersatu dan meningkatkan perjuangan bersama guna mendesak pemerintah dan lembaga-lembaga multilateral agar mengatasi dan membongkar tatanan yang tidak berkelanjutan ini.

---

<sup>[1]</sup> Dana Abed and Fatimah Kelleher (2022). *The Assault of Austerity: How Prevailing Economic Policy Choices are a Form of Gender-Based Violence*. <https://policy-practice.oxfam.org/resources/the-assault-of-austerity-how-prevailing-economic-policy-choices-are-a-form-of-g-621448/> [Diakses 13 Mei 2024].

<sup>[2]</sup> Rachel Easter, [Amy Friedrich-Karnik](#) and [Megan L. Kavanaugh](#), (2024), *Any Restrictions on Reproductive Health Care Harm Reproductive Autonomy: Evidence from Four States*. <https://www.guttmacher.org/report/any-restrictions-reproductive-health-care-harm-reproductive-autonomy-evidence-four-states> [Diakses 13 Mei 2024].

<sup>[3]</sup> <https://www.aljazeera.com/news/2024/5/12/un-chief-urges-immediate-ceasefire-in-gaza-as-35000-palestinians-killed> [Diakses 13 Mei 2024].

<sup>[4]</sup> Centre for Feminist Foreign Policy (2024) *Strongmen and Violence: Interlinkages of anti-feminism and anti-democratic developments*. Centre for Feminist Foreign Policy, Berlin. <https://centreforfeministforeignpolicy.org/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/CFFP-strongmen-and-violence.pdf> [Diakses 13 Mei 2024].

<sup>[5]</sup> <https://www.voanews.com/a/internal-documents-show-the-world-health-organization-paid-sexual-abuse-victims-in-congo-250-each/7354013.html> [Diakses 13 Mei 2024].

<sup>[6]</sup> Kerry Cullinan (2024) *Row over Reproductive Rights Group at WHO Executive Board 'Undermines' Secretariat and 'Science-Based' Approach*. <https://healthpolicy-watch.news/row-over-reproductive-rights-group-at-who-board-undermines-science-based-approach/> [Diakses 13 Mei 2024].

<sup>[7]</sup> Misal: [Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan \(CEDAW\)](#), perjanjian internasional yang diadopsi pada tahun 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa; [Deklarasi dan Platform Aksi Beijing \(BpfA\)](#), yang disepakati pada saat Konferensi Dunia ke-4 tentang perempuan pada tahun 1995; [Protokol Maputo untuk Memajukan Hak-Hak Perempuan Afrika](#), yang diadopsi oleh Uni Afrika pada tahun 2003 dan diundangkan pada tahun 2005.

***Credits:***

*We deeply appreciate Dian Maria Blandina for this thoughtful translation. We're truly grateful for your generosity and the genuine dedication you've shown in supporting this cause.*